



# 2021

## RENCANA KINERJA (RKT) 2022 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



### Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan

 **Telepon : 0411 - 3624058**

 **Faximile : 0411 - 3634667**

 **Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)**

 **Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022**  
**SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

Uraian <i>1</i>	Indikator kinerja <i>2</i>	2022 <i>3</i>	Program	Kegiatan <i>4</i>	Output/ Keluaran <i>5</i>	Indikator Kegiatan <i>6</i>	Anggaran (Rp) <i>7</i>
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu	523.325.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang	5%					

	Diselesaikan dengan Diversi						
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80% (Indeks 3,1)					
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Hukum Perseorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum</li> <li>- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu</li> </ul>	
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10%					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%					
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.370.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>- Perkara Hukum Perseorangan</li> </ul>	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	NIHIL (tidak mempunyai zetting plaat)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan	72.000.000

	Hukum (Posbakum)						
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan	- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu	Perkara perdata tidak dibiayai negara
<b>Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan</b>	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	19.541.722.000
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional kantor :						
	- DIPA 01	93%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	4.728.461.000
	- DIPA 03	94%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Percepatan Penyelesaian Perkara - Perkara Hukum Perseorangan - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	- Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum - Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tk. pertama dan tk. banding tepat waktu - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	523.325.000

	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Realisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Layanan Peradilan	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	11.451.500.000
--	---	------	----------------------------	---	--	--	----------------

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 8 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



*[Handwritten signature]*

SIGID TRIYONO, S.H., M.H.  
NIP. 196504121992121001